

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202472794, 27 Juli 2024

Pencipta

Nama : **Dra. Nurainun Bangun, M.M., Ak., CA**
Alamat : **JL. KANO RAYA NO.6 KELAPA DUA, TANGERANG - 15810, Curug, Tangerang, Banten, 15810**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **DRA. NURAINUN BANGUN, M.M., AK., CA**
Alamat : **JL. KANO RAYA NO.6 KELAPA DUA, TANGERANG - 15810, Curug, Tangerang, Banten 15810**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Modul**

Judul Ciptaan : **EDUKASI SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM UNTUK MENDUKUNG KEBERLANJUTAN DALAM INDUSTRI PANGAN**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : **26 April 2024, di Kota Tangerang**
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000648142**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

**MODUL
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**EDUKASI SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM
UNTUK Mendukung Keberlanjutan dalam
INDUSTRI PANGAN**

Penyusun:
DRA. NURAINUN BANGUN, M.M., AK., CA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JULI - 2024**

ABSTRAK

UMKM hadir karena memberikan peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, usaha-usaha yang sedang viral dan memberikan peluang usaha, selera, harganya terjangkau oleh masyarakat umum, adanya konsumen yang menjadi pelanggan setia, tersedianya bahan baku yang membuka peluang usaha, dan sebagainya. Semua ini menjadi peluang terhadap perlindungan hukum usaha tidak akan berlaku jika suatu usaha memiliki acuan perizinan yang tidak rasional dan jelas.

Namun demikian, pelaku UMKM menghadapi masalah dalam usaha yang dijalankan seperti masalah modal, kurangnya pengetahuan dan kemampuan SDM mengelola modal usaha, kurangnya pengelolaan keuangan usaha secara baik, dan lemahnya pengetahuan tentang sertifikasi halal. Kurangnya sosialisasi mengenai sertifikasi halal terhadap UMKM menjadikan tidak sepenuhnya pelaku UMKM mengetahui pentingnya manfaat sertifikat halal bagi produk, sehingga perkembangan usaha UMKM tidak bertumbuh secara maksimal.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kelapadua, Tangerang telah diberikan edukasi tentang pentingnya sertifikat halal guna membangun kepercayaan dan keberlanjutan dalam industri pangan serta cara untuk memperoleh sertifikat halal.

Kata kunci: UMKM, produk kuliner, sertifikasi halal, keberlanjutan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Sertifikasi Halal	3
1.3. Manfaat Sertifikasi Halal	5
BAB 2. SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA	8
2.1. Sejarah Sertifikasi Halal	8
2.2. Sistematika Sertifikasi Halal.....	10
2.3. Proses Permohonan Sertifikasi Halal untuk UMKM	11
BAB 3. MANFAAT, TANTANGAN, DAN STRATEGI UMKM	15
3.1. Manfaat Sertifikasi Halal Bagi UMKM.....	15
3.2. Tantangan dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal	15
3.3. Dampak Sertifikasi Halal pada Keberlanjutan Usaha.....	16
3.4. Strategi untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal	16
3.5. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait	17
BAB 4. PENUTUP	18
4.1. Kesimpulan	18
4.2. Rekomendasi bagi UMKM	18
REFERENSI	19

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sertifikasi halal adalah proses verifikasi yang memastikan bahwa produk, terutama produk makanan dan minuman, mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan dalam Islam. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebutuhan akan produk halal sangat tinggi. Sertifikasi halal bukan hanya penting untuk mematuhi kebutuhan konsumen domestik, tetapi juga untuk menjangkau pasar global yang lebih luas, di mana permintaan produk halal terus meningkat.

Sertifikasi halal pada usaha kuliner UMKM di Indonesia menjadi sangat penting karena berbagai alasan yang berakar pada aspek religius, ekonomi, dan sosial. Pertama, dari segi religius, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana mayoritas konsumen membutuhkan kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar syariat Islam. Halal tidak hanya mencakup bahan-bahan yang digunakan dalam makanan tetapi juga cara pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk mereka aman dan sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kedua, dari perspektif ekonomi, sertifikasi halal membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM. Tidak hanya pasar domestik, tetapi juga pasar internasional di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang memerlukan produk bersertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi salah satu syarat utama untuk memasuki pasar-pasar ini, sehingga UMKM yang memiliki sertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan ekspor dan pertumbuhan bisnis mereka. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran global tentang produk halal, permintaan tidak hanya datang dari konsumen Muslim tetapi juga dari non-Muslim yang mengasosiasikan produk halal dengan kualitas dan kebersihan yang lebih tinggi. Ketiga, dari segi sosial, sertifikasi halal juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. UMKM yang bersertifikasi halal cenderung memperhatikan standar kebersihan dan kualitas yang tinggi dalam proses produksi mereka. Ini tidak hanya memberikan produk yang lebih baik dan lebih aman bagi konsumen tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan etis. Lebih lanjut, sertifikasi halal sering kali melibatkan program pelatihan dan edukasi bagi pelaku UMKM, yang pada akhirnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam manajemen produksi, pengolahan makanan, dan standar kebersihan. Ini berkontribusi pada

peningkatan keseluruhan kualitas industri kuliner dan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas. Keempat, sertifikasi halal juga dapat menjadi alat strategis untuk diferensiasi di pasar yang kompetitif. Dalam industri kuliner yang sangat kompetitif, memiliki sertifikasi halal dapat menjadi pembeda yang signifikan. Konsumen sering kali mencari produk yang memberikan jaminan tambahan mengenai kualitas dan kepercayaan. Sertifikasi halal dapat menjadi tanda bahwa sebuah produk telah melewati proses verifikasi yang ketat dan memenuhi standar tinggi, memberikan nilai tambah yang penting dalam menarik konsumen.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan dukungan kuat terhadap sertifikasi halal melalui berbagai kebijakan dan program. Pemerintah menyediakan subsidi dan bantuan teknis untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal, serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi ini. Dukungan pemerintah ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasar domestik aman dan sesuai dengan standar yang diinginkan konsumen.

Namun, meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, mendapatkan sertifikasi halal juga menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi UMKM. Biaya sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, audit, dan mungkin perlu adanya perubahan dalam proses produksi atau pemasok bahan baku, bisa menjadi kendala bagi UMKM yang memiliki sumber daya terbatas. Kurangnya pengetahuan dan edukasi mengenai proses sertifikasi halal juga menjadi hambatan. Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan usaha kolaboratif antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan asosiasi bisnis untuk menyediakan informasi yang jelas dan bantuan yang diperlukan agar UMKM dapat berhasil melalui proses sertifikasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan signifikan dalam teknologi dan inovasi yang dapat membantu proses sertifikasi halal. Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi dan platform online, dapat menyederhanakan proses pendaftaran dan audit. Teknologi blockchain juga mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam rantai pasokan halal. Inovasi-inovasi ini tidak hanya membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal tetapi juga memastikan bahwa standar halal dapat dipertahankan dengan lebih baik di seluruh rantai pasokan.

Secara keseluruhan, sertifikasi halal pada usaha kuliner UMKM adalah langkah strategis yang tidak hanya memenuhi kebutuhan religius konsumen Muslim tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan, meningkatkan kualitas dan kebersihan produk, serta memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Dengan dukungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi inovatif, UMKM dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan sertifikasi halal untuk

pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Pemerintah, lembaga sertifikasi, dan berbagai pihak terkait harus terus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung, memastikan bahwa proses sertifikasi halal menjadi lebih mudah diakses dan terjangkau bagi semua UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai pendorong utama bagi keberlanjutan dan perkembangan industri kuliner UMKM di Indonesia, mengangkat standar industri, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

1.2. Tujuan Sertifikasi Halal

Tujuan utama dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar syariat Islam. Ini mencakup tidak hanya bahan-bahan yang digunakan, tetapi juga proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. Bagi UMKM, sertifikasi halal dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar.

Sertifikasi halal pada usaha kuliner UMKM di Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting dan luas, mencakup berbagai aspek mulai dari keagamaan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Pertama-tama, tujuan utama sertifikasi halal adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan syariat Islam. Dalam agama Islam, konsumsi makanan yang halal dan thayyib (baik) adalah bagian penting dari praktik keagamaan. Oleh karena itu, dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kehalalan yang ketat, mulai dari bahan baku hingga proses produksi dan distribusi. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim, yang merupakan mayoritas populasi di Indonesia.

Selain aspek keagamaan, sertifikasi halal juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk. Proses sertifikasi melibatkan audit yang ketat terhadap seluruh rantai produksi, termasuk pemilihan bahan baku, proses pengolahan, sanitasi, dan penyimpanan. Dengan memenuhi standar halal, UMKM secara otomatis meningkatkan standar kebersihan dan kualitas produk mereka. Ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen Muslim tetapi juga bagi konsumen non-Muslim yang mencari produk yang aman dan berkualitas tinggi. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai tanda kualitas yang diakui, memberikan jaminan tambahan tentang kebersihan dan keamanan produk kuliner.

Tujuan ekonomi dari sertifikasi halal tidak kalah penting. Sertifikasi halal membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, baik di tingkat domestik maupun internasional. Di pasar domestik, produk bersertifikasi halal memiliki daya tarik lebih bagi konsumen Muslim, yang

merupakan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Di tingkat internasional, banyak negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lainnya, mewajibkan produk impor memiliki sertifikasi halal. Dengan sertifikasi ini, UMKM dapat menembus pasar ekspor yang lebih besar, meningkatkan volume penjualan, dan pertumbuhan bisnis. Selain itu, permintaan global untuk produk halal terus meningkat, tidak hanya dari konsumen Muslim tetapi juga dari konsumen non-Muslim yang mengasosiasikan produk halal dengan standar kualitas dan kebersihan yang lebih tinggi.

Sertifikasi halal juga memiliki tujuan untuk mendorong daya saing UMKM. Dalam industri kuliner yang sangat kompetitif, memiliki sertifikasi halal dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Sertifikasi ini dapat membantu UMKM membedakan produk mereka dari pesaing, menarik lebih banyak konsumen, dan membangun reputasi yang kuat di pasar. Konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang telah melalui proses sertifikasi yang ketat dan memenuhi standar tinggi. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat membantu UMKM meningkatkan citra merek mereka dan memenangkan kepercayaan konsumen.

Selain itu, sertifikasi halal memiliki tujuan sosial yang signifikan. Proses sertifikasi sering kali melibatkan pelatihan dan edukasi bagi pelaku UMKM tentang pentingnya kehalalan, standar kebersihan, dan manajemen produksi yang baik. Ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keseluruhan kualitas industri kuliner. Selain itu, dengan memenuhi standar halal, UMKM berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan produk yang aman, bersih, dan berkualitas tinggi. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal dan mendukung keberlanjutan usaha.

Pemerintah Indonesia juga memiliki peran penting dalam mendukung tujuan sertifikasi halal. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini termasuk subsidi untuk biaya sertifikasi, bantuan teknis, dan program pelatihan. Dukungan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan finansial dan teknis yang mungkin dihadapi oleh UMKM dalam proses sertifikasi. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat lebih mudah diakses oleh semua UMKM, tidak hanya oleh yang memiliki sumber daya lebih besar. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasar domestik aman dan sesuai dengan standar yang diinginkan konsumen.

Teknologi dan inovasi juga menjadi bagian penting dari tujuan sertifikasi halal. Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi dan platform online, dapat menyederhanakan proses pendaftaran dan audit. Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk meningkatkan

transparansi dan kepercayaan dalam rantai pasokan halal. Inovasi-inovasi ini membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal, serta memastikan bahwa standar halal dapat dipertahankan dengan lebih baik di seluruh rantai pasokan. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat lebih efisien dalam proses sertifikasi dan lebih cepat memenuhi persyaratan halal.

Di sisi lain, tujuan sertifikasi halal juga mencakup peningkatan keberlanjutan usaha UMKM. Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang dibutuhkan untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berkembang. Sertifikasi halal membantu UMKM membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang, dengan fokus pada kualitas, keamanan, dan kepercayaan konsumen. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, mengingat perubahan dinamika pasar dan kebutuhan konsumen yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, sertifikasi halal juga bertujuan untuk mendorong inklusi dan keberagaman dalam industri kuliner. Dengan memastikan bahwa produk halal tersedia secara luas, UMKM berkontribusi pada keberagaman pilihan konsumen dan mendukung inklusi sosial. Ini penting dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, di mana produk dari berbagai budaya dan tradisi semakin berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk kuliner Indonesia dapat bersaing di pasar global dan diterima oleh konsumen dari berbagai latar belakang.

Secara keseluruhan, tujuan sertifikasi halal pada usaha kuliner UMKM sangatlah komprehensif, mencakup aspek religius, kesehatan, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan, meningkatkan kualitas dan keamanan produk, dan membangun keunggulan kompetitif di pasar. Dukungan pemerintah dan inovasi teknologi semakin memperkuat tujuan sertifikasi halal, memastikan bahwa prosesnya lebih mudah diakses dan efisien bagi semua UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi sebagai alat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kuliner UMKM di Indonesia, mengangkat standar industri, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

1.3. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal membawa berbagai manfaat bagi UMKM. Ini termasuk peningkatan kepercayaan konsumen, akses ke pasar yang lebih luas, dan peningkatan kualitas produk. Dengan memiliki sertifikat halal, UMKM dapat membedakan produk mereka dari pesaing dan menarik konsumen yang lebih peduli dengan kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Sertifikasi halal pada usaha kuliner UMKM memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik dari segi religius, ekonomi, kualitas produk, maupun sosial. Manfaat utama sertifikasi halal adalah memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, sertifikasi halal membantu UMKM untuk memenuhi kebutuhan mayoritas konsumen di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim dapat ditingkatkan secara signifikan dengan adanya sertifikasi halal, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan penjualan dan pertumbuhan bisnis.

Secara ekonomi, sertifikasi halal membuka akses pasar yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar internasional. Banyak negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, mewajibkan produk impor memiliki sertifikasi halal. Dengan memperoleh sertifikasi ini, UMKM dapat menembus pasar ekspor yang lebih luas, meningkatkan volume penjualan, dan memperluas pangsa pasar. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat menarik konsumen non-Muslim yang mencari produk yang diasosiasikan dengan standar kualitas dan kebersihan yang tinggi. Dengan demikian, sertifikasi halal membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka di pasar global yang semakin kompetitif.

Manfaat lainnya adalah peningkatan kualitas dan keamanan produk. Proses sertifikasi halal melibatkan audit yang ketat terhadap seluruh rantai produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyimpanan dan distribusi. Hal ini mendorong UMKM untuk menerapkan praktik produksi yang lebih higienis dan berkualitas tinggi. Dengan meningkatkan standar operasional, UMKM tidak hanya memenuhi persyaratan halal tetapi juga meningkatkan keseluruhan kualitas produk mereka. Ini sangat penting untuk membangun reputasi yang baik dan memenangkan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.

Dari perspektif sosial, sertifikasi halal berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan memenuhi standar halal, UMKM memastikan bahwa produk mereka aman, bersih, dan berkualitas tinggi, yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan konsumen. Selain itu, proses sertifikasi sering kali melibatkan pelatihan dan edukasi bagi pelaku UMKM tentang pentingnya kehalalan, standar kebersihan, dan manajemen produksi yang baik. Ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas industri kuliner secara keseluruhan. Selain itu, dengan menyediakan produk yang sesuai dengan keyakinan religius konsumen, UMKM berkontribusi pada inklusi sosial dan keberagaman.

Pemerintah Indonesia juga mendukung sertifikasi halal melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mempermudah UMKM mendapatkan sertifikasi ini. Dukungan pemerintah mencakup subsidi untuk biaya sertifikasi, bantuan teknis, dan program pelatihan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan finansial dan teknis yang mungkin dihadapi oleh UMKM dalam proses sertifikasi, memastikan bahwa lebih banyak UMKM dapat mendapatkan manfaat dari sertifikasi halal.

Secara keseluruhan, sertifikasi halal memberikan manfaat yang luas dan signifikan bagi UMKM. Dengan memastikan produk yang sesuai dengan standar halal, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan kualitas dan keamanan produk, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari pemerintah dan penerapan teknologi inovatif semakin memperkuat manfaat sertifikasi halal, memastikan bahwa prosesnya lebih mudah diakses dan efisien bagi semua UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal adalah alat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kuliner UMKM di Indonesia, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, dan mendukung inklusi sosial serta keberagaman.

BAB 2. SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

2.1. Sejarah Sertifikasi Halal

Sejarah sertifikasi halal di Indonesia dimulai dengan upaya dari berbagai organisasi Islam untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan syariat. Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan prosedur untuk sertifikasi halal. Sejarah sertifikasi halal di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Muslim serta mendukung industri makanan dan minuman yang sesuai dengan syariat Islam. Pada awalnya, kebutuhan akan makanan halal di Indonesia lebih didasarkan pada tradisi dan pengetahuan lokal. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan konsumen terhadap produk yang benar-benar halal, kebutuhan akan sistem sertifikasi yang formal dan terpercaya pun semakin mendesak.

Pada akhir tahun 1980-an, lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal mulai dibentuk. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi pionir dalam hal ini dengan membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989. Tujuan utama pembentukan LPPOM MUI adalah untuk menjamin kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar di Indonesia. LPPOM MUI mulai melakukan audit dan sertifikasi produk secara sistematis, sehingga konsumen dapat yakin bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan standar syariat Islam.

Pada masa-masa awal, proses sertifikasi halal masih terbatas dan hanya mencakup sebagian kecil dari produk yang beredar di pasar. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim, permintaan akan produk bersertifikat halal terus meningkat. Pada tahun 1996, MUI mengeluarkan kebijakan bahwa semua produk yang mengklaim halal harus mendapatkan sertifikasi dari LPPOM MUI. Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan standar dan konsistensi produk halal di Indonesia.

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih lanjut dengan mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini mengatur bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Undang-undang ini juga mengamankan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama untuk mengawasi pelaksanaan jaminan produk halal. BPJPH bertugas untuk mengeluarkan sertifikat

halal dan mengawasi proses sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah diakreditasi.

Implementasi UU JPH menandai perubahan signifikan dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia. Dengan adanya BPJPH, proses sertifikasi halal menjadi lebih terstruktur dan terpusat. BPJPH bekerja sama dengan MUI yang tetap berperan dalam menetapkan fatwa halal, serta LPH yang melakukan audit dan pemeriksaan produk. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses sertifikasi halal berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar internasional.

Seiring dengan berjalannya waktu, sertifikasi halal di Indonesia terus berkembang dan mengalami penyempurnaan. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melalui BPJPH mulai mewajibkan sertifikasi halal untuk produk-produk tertentu secara bertahap, dimulai dari makanan dan minuman. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal dan telah melalui proses pemeriksaan yang ketat.

Selain itu, perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi sistem sertifikasi halal di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam proses sertifikasi halal, seperti aplikasi digital untuk pendaftaran dan pelacakan sertifikat halal, telah meningkatkan efisiensi dan transparansi proses sertifikasi. Teknologi blockchain juga mulai diperkenalkan untuk memastikan keaslian dan transparansi rantai pasokan halal, sehingga konsumen dapat melacak asal-usul dan proses produksi produk halal dengan lebih mudah.

Dalam beberapa tahun terakhir, sertifikasi halal di Indonesia juga semakin mendapatkan pengakuan internasional. Produk-produk bersertifikat halal dari Indonesia semakin diterima di pasar global, termasuk di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Hal ini membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi UMKM dan industri makanan dan minuman Indonesia, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Namun, meskipun telah mencapai banyak kemajuan, sertifikasi halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah memastikan bahwa semua pelaku usaha, terutama UMKM, dapat mengakses proses sertifikasi halal dengan mudah dan terjangkau. Dukungan pemerintah melalui subsidi dan bantuan teknis sangat penting untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal dan standar kehalalan.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya bersama ini akan memastikan bahwa sistem sertifikasi halal di Indonesia terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen Muslim serta mendukung pertumbuhan industri halal. Keberhasilan sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas dan keamanan produk, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, sejarah sertifikasi halal di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk menyediakan produk yang sesuai dengan syariat Islam dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Dari pembentukan LPPOM MUI pada akhir 1980-an hingga implementasi UU JPH dan pembentukan BPJPH, sistem sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan. Dengan terus berinovasi dan berkolaborasi, sertifikasi halal di Indonesia diharapkan dapat terus memenuhi kebutuhan konsumen dan mendukung pertumbuhan industri halal di masa depan

2.2. Sistematisasi Sertifikasi Halal

Badan Sertifikasi Halal Di Indonesia, MUI adalah badan utama yang bertanggung jawab untuk sertifikasi halal. MUI bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan industri untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar halal yang ketat. Selain MUI, beberapa lembaga lainnya juga berperan dalam mendukung proses sertifikasi.

Proses sertifikasi halal di Indonesia adalah suatu prosedur yang sistematis dan menyeluruh, bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Proses ini dimulai dengan permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diakreditasi. Pelaku usaha harus mengisi formulir permohonan dan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti daftar bahan baku, informasi tentang proses produksi, dan data lainnya yang relevan.

Setelah dokumen permohonan diterima, LPH akan melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, langkah selanjutnya adalah audit lapangan. Dalam audit ini, auditor dari LPH akan mengunjungi lokasi produksi untuk memeriksa seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan produksi sesuai dengan standar kehalalan dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang haram atau najis.

Selain pemeriksaan fisik di lapangan, auditor juga melakukan wawancara dengan manajemen dan karyawan untuk mengevaluasi pengetahuan mereka tentang praktik halal dan kebijakan perusahaan terkait kehalalan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kesadaran dan penerapan prinsip halal diterapkan secara menyeluruh di semua tingkatan perusahaan. Selanjutnya, auditor akan mengambil sampel produk untuk diuji di laboratorium guna memastikan bahwa produk tersebut bebas dari kandungan yang haram atau berbahaya.

Setelah audit lapangan dan uji laboratorium selesai, hasil pemeriksaan akan dianalisis dan dibandingkan dengan standar kehalalan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika produk dinyatakan memenuhi semua persyaratan, LPH akan menyusun laporan dan merekomendasikan penerbitan sertifikat halal kepada BPJPH. BPJPH kemudian akan mengeluarkan sertifikat halal yang sah untuk produk tersebut. Sertifikat ini biasanya berlaku selama dua tahun, setelah itu pelaku usaha harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikasi.

Selama masa berlaku sertifikat, pelaku usaha wajib menjaga konsistensi dalam menerapkan standar halal yang telah disetujui. BPJPH dan LPH juga berhak melakukan audit berkala atau inspeksi mendadak untuk memastikan bahwa standar kehalalan tetap dipatuhi. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, sertifikat halal dapat dicabut, dan pelaku usaha harus memperbaiki kekurangan tersebut sebelum mengajukan permohonan sertifikasi ulang.

Proses sertifikasi halal ini, meskipun terperinci dan ketat, memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha. Dengan sertifikat halal, produk dapat diterima lebih luas oleh konsumen Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia, serta membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim besar. Selain itu, proses ini juga membantu meningkatkan standar kualitas dan keamanan produk, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya halal tetapi juga *thayyib* (baik) untuk dikonsumsi.

Secara keseluruhan, proses sertifikasi halal di Indonesia adalah langkah penting untuk memastikan produk yang beredar sesuai dengan syariat Islam, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendukung pertumbuhan industri halal. Melalui kerjasama yang baik antara pelaku usaha, LPH, BPJPH, dan MUI, sertifikasi halal dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk Indonesia di pasar global.

2.3. Proses Permohonan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Secara keseluruhan, proses sertifikasi halal bagi produk UMKM di Indonesia adalah suatu mekanisme yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya

bermanfaat bagi konsumen dalam memberikan jaminan kehalalan, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar global. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha, sertifikasi halal dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan konsumen akan produk yang halal dan *thayyib* (baik).

Proses sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia adalah sebuah rangkaian prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Langkah awal dalam proses ini adalah pengajuan permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diakreditasi. Pelaku usaha diharuskan mengisi formulir permohonan sertifikasi dan melampirkan berbagai dokumen pendukung, termasuk daftar bahan baku yang digunakan, informasi detail mengenai proses produksi, serta data lain yang relevan dengan produk yang akan disertifikasi.

Setelah dokumen permohonan diterima oleh LPH, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan awal, LPH akan mengatur jadwal untuk melakukan audit lapangan. Audit lapangan ini adalah tahap kritis dalam proses sertifikasi halal, di mana auditor dari LPH akan mengunjungi lokasi produksi UMKM untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses produksi. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyimpanan dan distribusi, dilakukan sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditetapkan.

Selama audit lapangan, auditor akan memeriksa berbagai aspek yang berkaitan dengan kehalalan produk. Hal ini meliputi pengecekan bahan baku untuk memastikan tidak ada yang mengandung unsur haram atau najis, serta memastikan bahwa peralatan dan fasilitas produksi bersih dan tidak terkontaminasi. Auditor juga akan mengamati proses produksi secara langsung, mulai dari tahap awal hingga produk akhir, untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi silang antara bahan halal dan bahan yang tidak halal. Selain pemeriksaan fisik, auditor juga melakukan wawancara dengan manajemen dan staf UMKM untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip kehalalan dan kebijakan internal perusahaan terkait kehalalan.

Selain audit lapangan, pengujian laboratorium juga merupakan bagian penting dari proses sertifikasi halal. Sampel produk akan diambil oleh auditor dan dikirim ke laboratorium yang telah terakreditasi untuk diuji kandungannya. Uji laboratorium ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk benar-benar bebas dari zat-zat haram dan berbahaya. Hasil dari pengujian ini akan dibandingkan dengan standar kehalalan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika produk dinyatakan bebas dari kontaminasi haram dan memenuhi semua persyaratan kehalalan, laporan hasil audit dan uji laboratorium akan disusun oleh LPH dan diajukan kepada BPJPH untuk penilaian akhir.

Jika BPJPH menilai bahwa semua persyaratan telah dipenuhi, sertifikat halal akan dikeluarkan untuk produk UMKM tersebut. Sertifikat ini biasanya berlaku untuk jangka waktu dua tahun. Selama masa berlaku sertifikat, pelaku usaha UMKM wajib menjaga konsistensi dalam penerapan standar halal yang telah disetujui. BPJPH dan LPH juga memiliki hak untuk melakukan audit berkala atau inspeksi mendadak guna memastikan bahwa standar kehalalan tetap dipatuhi oleh UMKM. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan standar halal, sertifikat halal dapat dicabut, dan UMKM harus memperbaiki kekurangan tersebut sebelum mengajukan permohonan sertifikasi ulang.

Proses sertifikasi halal bagi UMKM ini, meskipun ketat dan detail, memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama konsumen Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Sertifikasi halal juga membuka peluang bagi UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Produk yang bersertifikat halal memiliki daya tarik lebih di pasar global, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Selain itu, sertifikasi halal juga berfungsi sebagai jaminan kualitas produk, karena proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kebersihan dan keamanan produk.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung proses sertifikasi halal bagi UMKM melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi untuk biaya sertifikasi dan menyediakan bantuan teknis serta pelatihan bagi UMKM. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi hambatan finansial dan teknis yang mungkin dihadapi oleh UMKM dalam proses sertifikasi, sehingga lebih banyak UMKM dapat menikmati manfaat dari sertifikasi halal. Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi dalam proses sertifikasi halal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Misalnya, aplikasi digital dan platform online digunakan untuk memfasilitasi pendaftaran dan pelacakan

sertifikasi halal, serta teknologi blockchain mulai diperkenalkan untuk memastikan keaslian dan transparansi rantai pasokan halal.

Di sisi lain, kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal juga terus ditingkatkan. Lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM tentang pentingnya kehalalan produk dan proses sertifikasi. Edukasi ini tidak hanya membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya memproduksi makanan yang aman dan halal sesuai dengan syariat Islam.

Langkah-langkah dalam proses pengajuan sertifikasi halal untuk produk UMKM adalah sebagai berikut:

- a. **Persiapan Awal** Persiapan awal adalah langkah pertama yang penting dalam proses sertifikasi halal. UMKM perlu memahami persyaratan yang ditetapkan oleh badan sertifikasi dan memastikan bahwa semua aspek bisnis mereka siap untuk diaudit. Ini mencakup pemilihan bahan baku halal, pelatihan karyawan, dan penyesuaian proses produksi.
- b. **Prosedur Pendaftaran** Prosedur pendaftaran untuk sertifikasi halal melibatkan pengisian formulir dan pengumpulan dokumen yang relevan. UMKM perlu menyediakan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, dan pemasok. Setelah pendaftaran diterima, badan sertifikasi akan mengatur jadwal untuk audit.
- c. **Penilaian dan Audit** Audit adalah tahap penting dalam proses sertifikasi halal. Auditor akan mengunjungi fasilitas produksi untuk memastikan bahwa semua aspek memenuhi standar halal. Ini termasuk pemeriksaan bahan baku, proses produksi, sanitasi, dan penyimpanan. Setelah audit selesai, auditor akan menyusun laporan yang akan digunakan untuk penilaian akhir.
- d. **Pengeluaran Sertifikat** Jika UMKM lulus audit, mereka akan menerima sertifikat halal yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat ini harus diperbarui secara berkala melalui audit ulang untuk memastikan bahwa standar halal terus dipenuhi. Sertifikat halal dapat membantu UMKM meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar.

BAB 3. MANFAAT, TANTANGAN, DAN STRATEGI UMKM

3.1. Manfaat Sertifikasi Halal Bagi UMKM

Sertifikasi Halal memberikan banyak manfaat bagi keberlanjutan UMKM, diantaranya diuraikan pada point-point dibawah ini.

- a. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. Salah satu manfaat utama dari sertifikasi halal adalah peningkatan kepercayaan konsumen. Konsumen Muslim cenderung lebih memilih produk yang bersertifikat halal karena mereka yakin bahwa produk tersebut memenuhi standar syariat. Ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong pembelian berulang.
- b. Akses Pasar yang Lebih Luas. Sertifikasi halal membuka akses ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Banyak negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, mengharuskan produk makanan yang diimpor memiliki sertifikat halal. Dengan sertifikasi halal, UMKM dapat menembus pasar ini dan meningkatkan ekspor.
- c. Peningkatan Kualitas Produk. Proses sertifikasi halal mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Standar halal tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi, sanitasi, dan pengemasan. Dengan memenuhi standar ini, UMKM dapat memastikan bahwa produk mereka aman, bersih, dan berkualitas tinggi.
- d. Adanya Dukungan Pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan yang kuat untuk sertifikasi halal melalui berbagai kebijakan dan program bantuan. Ini termasuk subsidi untuk biaya sertifikasi, pelatihan, dan bimbingan teknis. Dukungan ini membantu UMKM untuk lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing mereka.

3.2. Tantangan dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal

Disamping manfaat yang banyak dari sertifikasi halal seperti yang diuraikan diatas, terdapat pula beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi sertifikasi halal. Penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

- a. Kendala Finansial Biaya sertifikasi halal dapat menjadi kendala bagi banyak UMKM, terutama yang memiliki sumber daya terbatas. Selain biaya pendaftaran dan audit, UMKM

mungkin perlu melakukan investasi tambahan untuk memenuhi persyaratan standar halal, seperti memperbaiki fasilitas produksi atau mengubah pemasok bahan baku.

- b. Kurangnya Pengetahuan dan Edukasi Banyak UMKM yang kurang memiliki pengetahuan tentang proses dan persyaratan sertifikasi halal. Kurangnya edukasi dan informasi dapat membuat proses sertifikasi terasa rumit dan membingungkan. Program pelatihan dan edukasi yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk membantu UMKM memahami dan mempersiapkan diri untuk sertifikasi.
- c. Kompleksitas Proses Proses sertifikasi halal melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, termasuk audit dan penilaian yang ketat. UMKM perlu memastikan bahwa semua aspek bisnis mereka siap untuk diperiksa dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang baik, yang bisa menjadi tantangan bagi UMKM dengan sumber daya yang terbatas.

3.3. Dampak Sertifikasi Halal pada Keberlanjutan Usaha

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen dan akses ke pasar yang lebih luas, UMKM dapat mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, proses sertifikasi mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi operasional, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan profitabilitas.

3.4. Strategi untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal

Keberadaan peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh sertifikasi halal, maka UMKM membutuhkan strategi yang pas agar mendapatkan manfaat yang luas. Penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

- a. Membangun Tim Sertifikasi Membangun tim khusus untuk mengelola proses sertifikasi halal adalah langkah penting. Tim ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persyaratan dipenuhi dan proses berjalan lancar. Tim harus terdiri dari anggota yang memiliki pemahaman tentang standar halal dan proses sertifikasi.
- b. Melakukan Pelatihan dan Edukasi Pelatihan dan edukasi adalah kunci untuk mempersiapkan UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal. Program pelatihan dapat mencakup topik seperti standar halal, prosedur audit, dan cara mengelola dokumentasi yang diperlukan. Pelatihan ini membantu karyawan memahami pentingnya sertifikasi dan bagaimana cara memenuhinya.

- c. Menggunakan Sumber Daya dan Dukungan yang Tersedia UMKM harus memanfaatkan semua sumber daya dan dukungan yang tersedia, termasuk program bantuan pemerintah, panduan dari lembaga sertifikasi, dan jaringan industri. Menggunakan sumber daya ini dapat membantu UMKM mengurangi biaya, mengatasi kendala, dan mempercepat proses sertifikasi.

3.5. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Keberadaan UMKM yang sudah sejak lama menjadi soko guru perekonomian Indonesia sangat diperhatikan oleh pemerintah, termasuk dalam mendukung proses sertifikasi halal untuk UMKM. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung sertifikasi halal melalui kebijakan yang mendukung. Ini termasuk peraturan yang memudahkan proses sertifikasi, subsidi untuk biaya sertifikasi, dan program pelatihan bagi UMKM. Kebijakan yang proaktif membantu UMKM lebih mudah mendapatkan sertifikasi dan meningkatkan daya saing mereka.
- b. Program Bantuan dan Subsidi Berbagai program bantuan dan subsidi yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait membantu UMKM mengatasi kendala finansial dalam proses sertifikasi halal. Program ini mencakup bantuan biaya pendaftaran, audit, dan peningkatan fasilitas produksi. Dengan bantuan ini, UMKM dapat lebih mudah memenuhi persyaratan sertifikasi dan meningkatkan kualitas produk mereka.
- c. Kolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi seperti MUI penting untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan panduan dan dukungan yang diperlukan. Lembaga sertifikasi dapat menyediakan informasi tentang standar halal, prosedur pendaftaran, dan audit. Kolaborasi ini membantu mempercepat proses sertifikasi dan memastikan bahwa UMKM memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sertifikasi halal membawa banyak manfaat bagi UMKM, termasuk peningkatan kepercayaan konsumen, akses ke pasar yang lebih luas, peningkatan kualitas produk, dan dukungan pemerintah. Proses sertifikasi juga mendorong UMKM untuk terus meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam operasional mereka.

Implikasi bagi UMKM mencakup kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. UMKM harus tetap inovatif dan siap untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang. Sertifikasi halal memberikan UMKM alat penting untuk bersaing di pasar global dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

4.2. Rekomendasi bagi UMKM

UMKM disarankan untuk memulai proses sertifikasi halal dengan membangun tim khusus, mengikuti pelatihan dan edukasi, dan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi dan pemerintah juga penting untuk memastikan bahwa proses berjalan lancar dan semua persyaratan dipenuhi. Kedepannya UMKM harus terus memantau perkembangan pasar halal dan teknologi yang terkait, serta tetap berkomitmen untuk menjaga standar halal dalam produk mereka. Dengan strategi yang tepat, sertifikasi halal dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di pasar global.

REFERENSI

- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Kurniawan, F. P. (2018). Analisis Dampak Modal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan (Studi Pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *JIM FEB Universitas Brawijaya*, 7(1).
- Mastuki. (2021). *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0>
- Puspitasari, R., & Astrini, D. (2021). Dampak Literasi Dan Inkuisi Keuangan Terhadap Kinerja Pelaku UMKM Di Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(2), 181–190. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i2.771>
- Santika, E. F. (2023). *Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022, Provinsi Mana Terbanyak?* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022-provinsi-mana-terbanyak>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Alfina Rahma Sabila, Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/525%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/525/379>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>